

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS
KESEHATAN
KOTA PAREPARE

NO : 000/01/LKJIP/2025
TANGGAL 28 FEBRUARI 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi kami selama tahun 2024, yang tentunya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan pelaksananya yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja tahunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh instansi kami. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan agar program-program yang telah dilaksanakan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

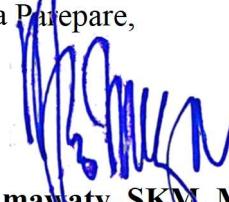
Kami menyadari bahwa pencapaian yang tercantum dalam laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan kontribusi besar dalam kelancaran tugas dan fungsi instansi ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mendukung terlaksananya setiap kegiatan dan pencapaian yang ada.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. Semoga, dengan komitmen yang terus kami jaga, instansi ini dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Akhir kata, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan laporan dan pencapaian kinerja kami di masa depan.

Parepare, Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Parepare,



Rahmawaty, SKM, M.Kes (MARS)
Pembina Utama Muda
Nip. 19750121 200212 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Upaya ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih optimal, diperlukan peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi ini mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, penyusunan LKjIP juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan panduan mengenai mekanisme evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, guna mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja organisasi. LKjIP menjadi dokumen pertanggungjawaban tahunan yang berisi informasi mengenai capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas menjadi pijakan utama bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, LKjIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib disampaikan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan penyusunan dan pelaporan kinerja yang transparan serta akuntabel, diharapkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. LKjIP disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja yang telah direncanakan, termasuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai instrumen akuntabilitas yang mendukung prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengakses dan menilai kinerja yang telah dicapai oleh instansi.

2. Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Sebagai alat kendali kinerja

LKjIP berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja setiap unit organisasi dalam Dinas Kesehatan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program serta kegiatan.

- b. Sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan program
Hasil analisis dalam LKjIP, yang mencakup identifikasi keberhasilan, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi, menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar lebih efektif dan tepat sasaran.
- c. Sebagai media umpan balik dari pemangku kepentingan
LKjIP menjadi salah satu instrumen bagi Dinas Kesehatan untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan terkait efektivitas program yang telah dijalankan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Sebagai bagian dari sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
Dengan adanya evaluasi kinerja yang terdokumentasi dalam LKjIP, Dinas Kesehatan dapat menerapkan konsep perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran pelayanan kesehatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan *penyelenggaraan* pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare dari tahun 2024-2026 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Parepare diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dalam struktur organisasi, Dinas Kesehatan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Parepare mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesehatan;
- b. pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan;
- d. pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Rincian Tugas

- a. Menyusun kebijakan strategis dan regulasi daerah terkait kesehatan sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kajian dan analisis terhadap kebutuhan serta permasalahan kesehatan di Kota Parepare.
- c. Menyusun pedoman teknis dalam pelaksanaan program kesehatan daerah, termasuk program kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

- d. Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah guna meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data.
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kesehatan dengan instansi terkait, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan di Kota Parepare.
- f. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
- g. Mengoordinasikan program kesehatan dengan organisasi profesi, akademisi, serta sektor swasta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis komunitas.
- h. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
- i. Melaksanakan program promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.
- j. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam lingkup Dinas Kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang bernaung di bawahnya.
- k. Mengoordinasikan program kesehatan yang berbasis masyarakat, seperti Posyandu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan Kota Sehat.
- l. Menyusun dan melaksanakan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah dan regulasi yang berlaku.
- m. Melakukan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- n. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.
- o. Melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan di Kota Parepare.

- p. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Wali Kota dalam rangka mendukung kebijakan daerah di bidang kesehatan.
- q. Mengambil peran dalam situasi kedaruratan kesehatan, seperti wabah penyakit, bencana alam, atau krisis kesehatan lainnya, sesuai dengan arahan dari pimpinan daerah.
- r. Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan lintas sektor yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, seperti sanitasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
- s. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program kesehatan yang bersifat integratif, seperti program penanggulangan gizi buruk dan pengentasan stunting.

D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dalam urusan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khusunya dalam urusan kesehatan adalah :

1. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional berupa transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan dan Teknologi Kesehatan. Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah.

2. Responsif Gender di bidang Kesehatan

masih banyak terdapat ketimpangan antara status kesehatan pada perempuan dan laki- laki. Masalah gender yang harus diprioritaskan penanganannya, adalah masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), pemberantasan Tuberkulosis Paru, Malaria, HIV/AIDS, masalah gizi masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat. Responsif Gender di bidang kesehatan merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kesehatan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya dan pelaksanannya. Responsif gender di bidang kesehatan perlu dilakukan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat yang

sama dari semua bidang pembangunan khususnya bidang kesehatan, serta terhindarnya laki-laki dan perempuan yang mengalami diskriminasi layanan kesehatan, akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak responsif gender

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare agar targetnya dapat terpenuhi. Masih adanya beberapa indikator seperti pelayanan kesehatan usia produktif yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

4. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di bidang kesehatan.

Masih adanya beberapa indikator TPB yang masih jauh di bawah target dan kurang lengkapnya data untuk memenuhi pencapaian target TPB

2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tidak intensif memantau ibu hamil yang beresiko tinggi di wilayah kerjanya;
3. masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama di usia kehamilan lebih dari 12 minggu;
4. masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
5. masih kurangnya frekuensi pelaksanaan edukasi pada masyarakat berisiko;
6. belum ada puskesmas mampu poned;
7. belum adanya regulasi yang mengatur persalinan di pelayanan kesehatan;
8. belum semua puskesmas menerapkan Poli MTBS;
9. pemantauan pasien yang sedang mengalami pengobatan tidak dilakukan secara intensif khususnya dari pemantauan dari keluarga terdekat. Obat TB harus

diminum secara rutin dan harus habis, ketika Obat TB tidak diminum sesuai aturan medis maka bakteri TB di dalam tubuh mengalami resistensi sehingga akan terjadi gagal pengobatan;

10. kurang intensifnya tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pencarian orang dengan terduga Tuberkulosis dan kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan penyakit Tuberkulosis;
11. makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko;
12. teknologi seksualitas yang semakin canggih dengan tersedianya fitur teknologi komersil seks dan mudahnya akses hubungan seks komersil dan tumbuhnya beragam orientasi seksual;
13. Populasi seks beresiko tinggi semakin bertambah disertai juga kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kondom dalam pencegahan penyakit menular seksual;
14. kurangnya jumlah tenaga kesehatan melakukan *screening* penyakit terhadap kelompok usia produktif;
15. masih banyaknya pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi karena diakibatkan oleh faktor agama, kesehatan, efek samping kontrasepsi, keluarga yang tidak mendukung, ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi;
16. pengetahuan Sang Ibu yang kurang memadai dan asupan nutrisi yang kurang baik bagi ibu dan balita;
17. asupan zat besi yang tidak memadai, tingkat pendapatan yang kurang, pengetahuan yang kurang dan dukungan keluarga yang kurang;
18. masih banyaknya kelompok usia remaja belum memahami bahaya merokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik;
19. pola makan yang berlebihan yang tinggi lemak dan gula serta kurang serat dan aktifitas fisik yang kurang gerak;
20. masih banyak Rumah Tangga yang belum melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare dibantu oleh :

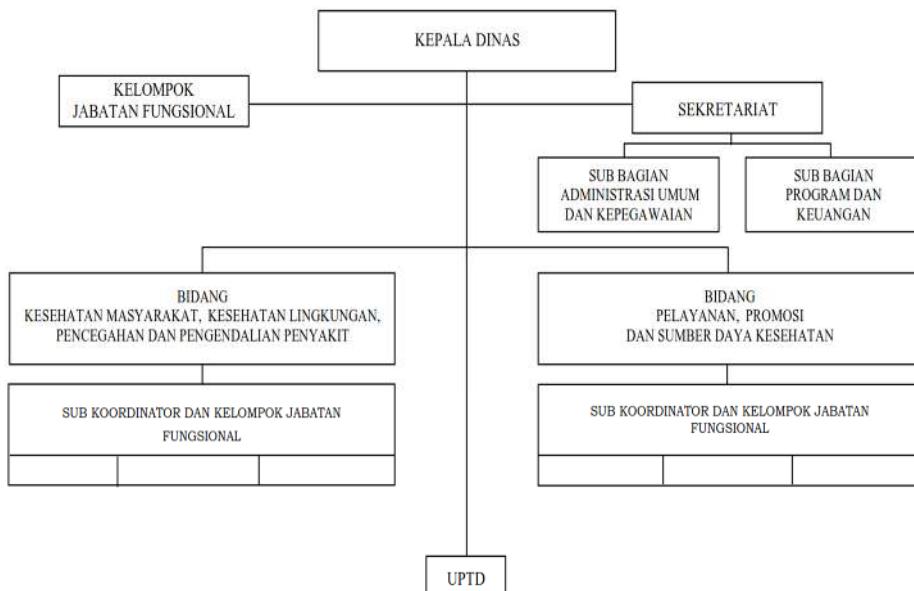
1. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat dilihat pada bagan berikut :

F. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

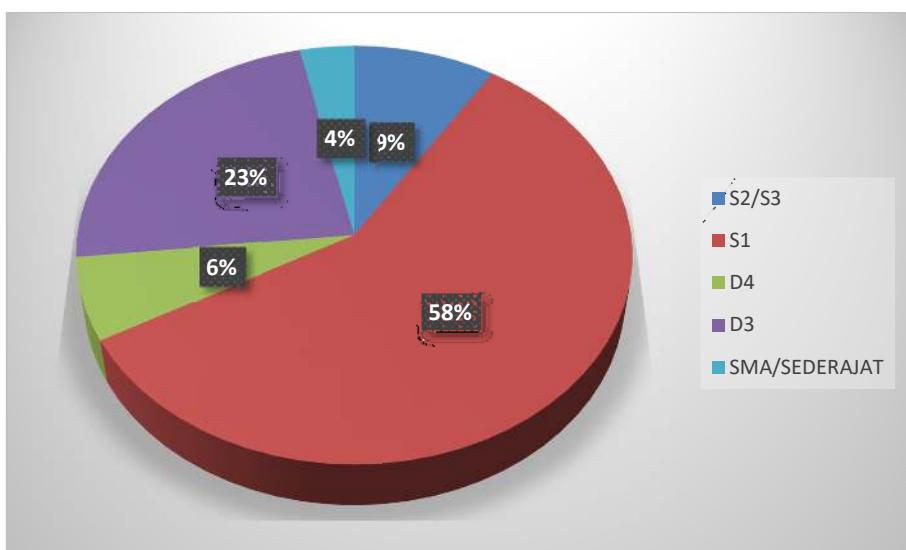
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2024 didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan Jabatan
Per 31 Desember Tahun 2024.

Jenjang	Pendidikan			Pangkat				Jabatan		
	Jumlah (Org)		Total	Jenjang	Jumlah (Org)		Total	Jenjang	Jumlah (Org)	
	L	P			L	P			L	P
S2	10	24	34	Pembina Utama	0	1	1	Eselon Iib	0	1
S1	33	182	215	Pembina Utama Muda	0	21	21	Eselon IIIa	0	1
D4	4	20	24	Pembina Tk. I	7	36	43	Eselon IIIb	2	0
D3	8	81	87	Pembina	18	56	74	Eselon Iva	2	2
SMA / Sederajat	4	9	13	Penata Tk. I	10	79	89	Eselon IVb	0	2
JUMLAH	59	316	375	Penata	10	64	74	Fungsional Khusus	53	285
				Penata Muda Tk.I	9	29	38	Fungsional Umum	4	19
				Penata Muda	4	18	22	Tubel	2	6
				Pengatur Tk.I	1	8	9	JUMLAH	59	316
				Pengatur	0	4	4			
				JUMLAH	59	316	375			

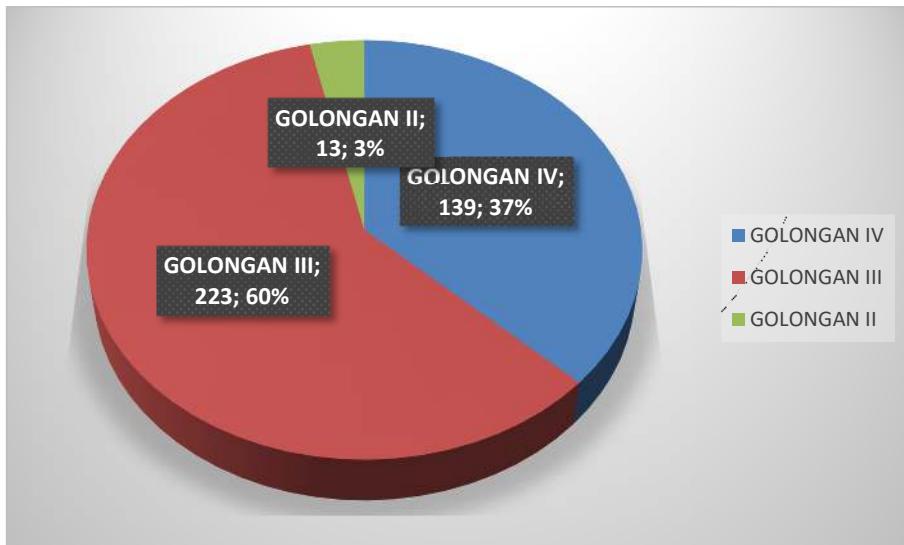
Aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2024 berjumlah 375 orang, yang terdiri dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 34 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 217 orang, Diploma 4 (D4) berjumlah 24 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 87 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 13 Orang.

**Grafik 1.1 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

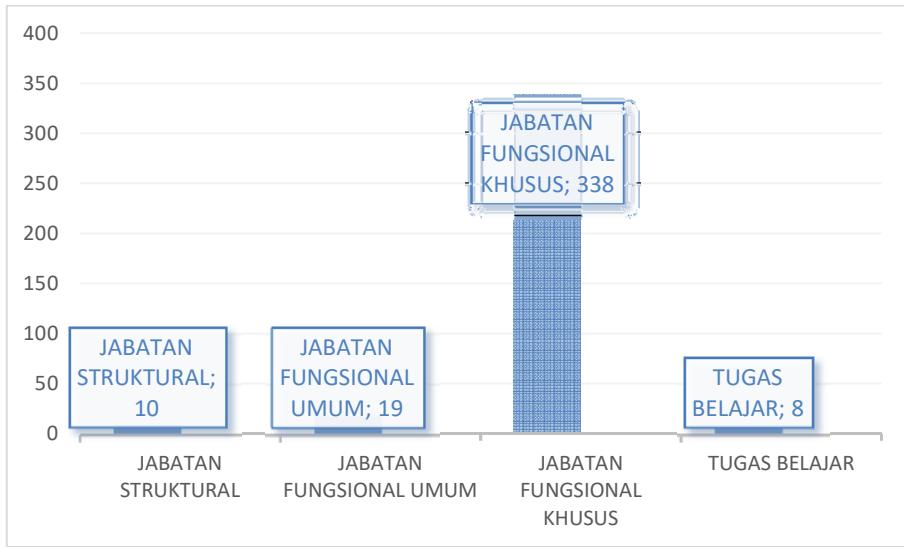


Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan tugas fungsionalnya sehingga mempengaruhi kinerja organisasi. Diperlukan penempatan pegawai berdasarkan tugas fungsionalnya agar kinerja pegawai yang fungsional dapat mendongkrak kinerja organisasi. Dari segi kepangkatan, aparatur Dinas Kesehatan terdiri dari 139 orang aparatur golongan IV, 223 orang berpangkat Golongan III, 13 orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 2 (dua) orang eselon IIIb, 4 orang eselon IVa serta 2 orang eselon IVb

**Grafik 1.2 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024
Bedasarkan Golongan**



Grafik 1.3 Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 Bedasarkan Jabatan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sasaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare yang telah ditetapkan, maka tujuan utama yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kesehatan

TUJUAN I	
Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	
No	Sasaran
1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan strategi utama di atas, maka dibuatlah strategi dan arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Tahun 2024 Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan sistem pelaporan capaian perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	Peningkatan Sistem Pelaporan Berbasis Teknologi Informasi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan	Akselerasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas kesehatan
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta distribusi tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Penyediaan dan Fasilitasi SDM kesehatan yang berkualitas
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Menjamin ketersediaan obat dan makanan serta alkes yang memenuhi standar Kesehatan	Peningkatan jumlah penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan yang memenuhi standar
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan Kegiatan GERMAS

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis untuk tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah		Cakupan Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Persen	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan Nilai SAKIP	Angka	B (70)	BB (80)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	Persen	79,67	80,16
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks SPM	Indeks	0,33	0,33
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Persen	5 %	10 %
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi	Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi	Persen	100	100

	masyarakat	standar dan aman bagi masyarakat			
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	80	90

B. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU dan APBD. Dinas Kesehatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	80,12
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang melayani	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai	B

D.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kesehatan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2024	Target Kinerja 2024
2	Indeks Kesehatan	%	79,97	80,12
2	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai	B	B

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 104.539.637.991 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Rencana Belanja Dinas Kesehatan TA. 2024

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Operasi	85.359.082.042	81,65
2	Belanja Modal	19.180.555.949	18,34
Jumlah		104.539.637.991	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.295.497.974	43,32 %
Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	57.702.297.917	55,19 %
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Percentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	458.694.700	0,43 %

Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	14.998.900	0,01 %
Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.068.148.500	1,02 %

Pada tabel di atas, jumlah anggaran dengan persentase terbesar pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sebesar 55,19 %. Dan jumlah anggaran dengan persentase terkecil pada sasaran Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat sebesar 0,01 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika tersedia);
5. melakukan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah diimplementasikan;
6. melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. menganalisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian kinerja sasaran strategis

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	80,12	79,97	59.244.140.017
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang melayani	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	Dalam Proses	45.295.497.974

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPD Pemerintah Kota Parepare maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dari Dinas Kesehatan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Untuk mengetahui capaian sasaran strategis ini maka dilakukan beberapa perbandingan dan analisis terhadap capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk	80,12	79,97	99,81

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran indeks Kesehatan di atas ditetapkan bahwa target tahun 2024 sebesar 80.12% adapun realisasi sebesar 79.97% sehingga dapat terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 99.81 persen atau kategori “**Sangat Baik**”.

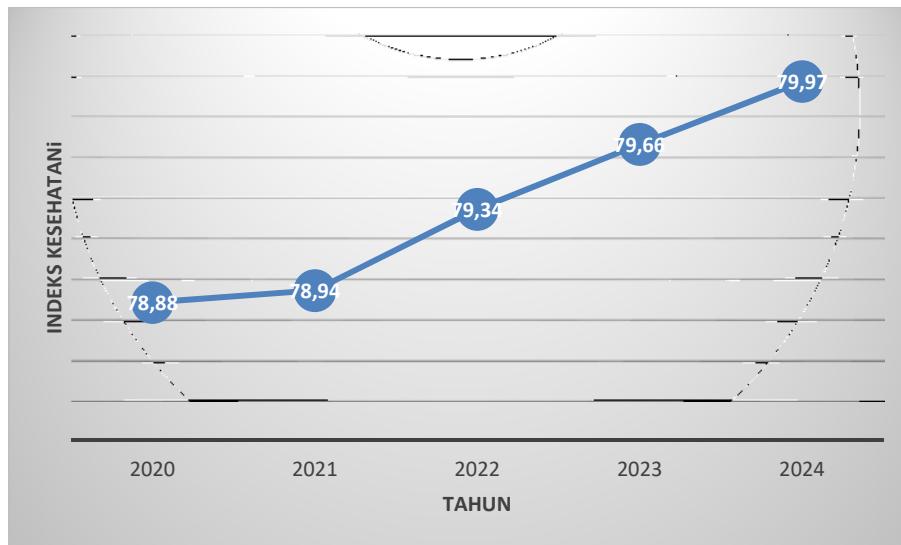
Indeks Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2024 adalah 79,97, bila dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kesehatan di 24 Kabupaten Sulawesi Selatan adalah 77,45 maka Indeks Kesehatan Kota Parepare di atas rata-rata capaian di 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan dan bila dibandingkan dengan indeks kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan adalah 79,12 maka Indeks Kesehatan Kota Parepare masih lebih tinggi.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berkenan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	Realisasi	Capaian (%)						
1	Indeks Kesehatan	Tahun	78,88	78,94	99,67	79,34	99,76	79,66	99,76	79,97	99,81

Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Parepare selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan, selama periode tersebut, secara rata-rata Indeks *tumbuh sebesar 0,34 % per tahun*. Pada Tahun 2020 sebesar 78,88 persen dan Pada Tahun 2024 mencapai 79,97 persen.

GRAFIK INDEKS KESEHATAN TAHUN 2020-2024



c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun Berkenan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam RPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2024	Target RPD	Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	Tahun	79,97	80,64	98,16

Jika membandingkan realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2024 sebesar 79,97 % dengan target pada akhir RPD sebesar 80,64% maka indeks kesehatan belum mencapai target pada akhir RPD, yang mana masih ada selisih 0,67%.

d. Perbandingan Indeks Kesehatan Kota Parepare dengan Indeks Kesehatan Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2024	Indeks Kesehatan Nasional Tahun 2024
1	Indeks Kesehatan	Tahun	79,97	83,31

Jika membandingkan realisasi Indeks Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 sebesar 79,97 persen dengan indeks kesehatan nasional sebesar 83,31 persen maka indeks kesehatan nasional masih lebih tinggi dibandingkan indeks kesehatan Kota Parepare.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, antara lain :

1). Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Adanya dukungan anggaran Baik Dari APBD Murni Kota Parepare dan Anggaran Transfer dari Pusat yakni DAK Fisik dan DAK Nonfisik
- b. Penguatan pada Pelayanan Kesehatan dasar yang berbasis di Puskesmas dengan penekanan pada upaya-upaya promotif dan preventif
- c. Peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan rujukan dengan peningkatan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Andi Makkasau dan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie
- d. Pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap melalui pelayanan Call Centre 112
- e. Keterlibatan lintas sektor dalam mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat dan penguatan pada upaya-upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat seperti keterlibatan kader posyandu

2). Permasalahan / Hambatan yang Dihadapi sehingga Indeks Kesehatan tidak tercapai target :

- a. Tingkat fertilitas dan kematian
- b. Masih adanya kasus kematian balita sebanyak 29 kasus
- c. Masih adanya kasus kematian neonatal sebanyak 24 kasus
- d. Masih adanya kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus
- e. Tingkat kematian akibat penyakit TB Paru sebesar 33 Kasus

3). Strategi Pemecahan Masalah

- a. Penguatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua lintas sektor terkait agar upaya-upaya kesehatan untuk pencegahan kematian bayi dan ibu hamil dapat dilaksanakan dengan baik agar dapat mengurangi kasus kematian bayi dan ibu hamil

- b. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas khususnya penyediaan alat-alat kesehatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal agar puskesmas dapat menangani kasus-kasus komplikasi kebidanan
- c. Meningkatkan kegiatan promosi perilaku hidup sehat dalam masyarakat seperti Germas dan menciptakan lingkungan yang sehat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya tenaga-tenaga kesehatan dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- e. Melakukan skrining kesehatan ibu hamil secara berkala untuk mendeteksi risiko kehamilan sejak dini, seperti anemia atau hipertensi dan meningkatkan cakupan kunjungan antenatal (ANC) minimal 6 kali sesuai standar pelayanan minimal.
- f. Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk memantau kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, serta memberikan edukasi secara berkala
- g. Mengadakan program edukasi reproduksi untuk remaja guna menekan angka kehamilan remaja dan risiko kesehatan ibu muda dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bayi dan pemeriksaan kesehatan ibu setelah melahirkan
- h. Memperkuat program deteksi dini TB Paru melalui kampanye dan pemeriksaan rutin di komunitas berisiko tinggi dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan TB dengan pendampingan pasien, serta menyediakan obat TB secara gratis dan mudah diakses.
- i. Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan data kematian ibu, bayi, dan anak untuk analisis yang lebih akurat dan menggunakan data tersebut untuk merancang intervensi yang lebih spesifik berdasarkan pola atau tren kasus.
- j. Memberikan suplementasi gizi kepada ibu hamil, seperti zat besi dan asam folat, untuk mencegah komplikasi kehamilan dan menggalakkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi untuk bayi dan balita.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, maka dalam APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 59.244.140.017,- yang terealisasi sebesar Rp. 52.670.421.090 atau 88,90 %.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a.1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya
 - a.2. Pengembangan Puskesmas
 - a.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - a.4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a.5. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - a.6. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - b.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - b.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - b.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - b.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - b.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - b.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - b.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - b.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - b.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - b.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
 - b.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana
 - b.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - b.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - b.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - b.17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b.18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - b.19 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - b.20 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - b.21 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - b.22 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - b.23 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - b.24 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - b.25 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - b.26 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - b.27 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - b.28 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

- b.29 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV ODHIV
- b.30. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- b.31. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - c.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota
 - a.1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - b.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - b.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - a.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - b.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - c.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

1. *Realisasi Penerimaan*

Terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Rp. 230.170.900	(200 %)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp. 22.800.000	(373 %)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp. 540.219	(180%)
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	Rp. 10.197.098	(20.394%)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (Kapitasi, Non Kapitasi, Pelayanan Umum Pasien)	Rp 11.159.711.097	(119 %)
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	Rp 1.258.578	(1.259 %)
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas	Rp 5.385.294.741	
Jumlah	Rp. 16.809.972.633	(177 %)

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 adalah 92.819.890.350 (88,78%)

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD
Dinas Kesehatan terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Realisasi anggaran Belanja Operasi SKPD Dinas Kesehatan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 74.674.182.237,- (87,48%) yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai	Rp.	30.003.845.531
-----------------	-----	----------------

Belanja Barang dan Jasa	Rp	44.670.336.706
-------------------------	----	----------------

2) Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.145.708.113,- (94,60%)

3. Rincian realisasi anggaran

Adapun rincian realisasi anggaran program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
2.	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	<p>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</p> <p>Alokasi anggaran sebesar Rp.35.928.963.389,- dengan realisasi Rp.33.076.306.370,- atau 92,06 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p>	<p>Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %</p> <p>Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, dengan target 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, target 1 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan target 1</p>	77,38 %	77,38 %		
					100,00 %	100,00%		
					2 dokumen	100,00 %		
					1 dokumen	100 %		
					1 dokumen	100,00%		
					1 dokumen	100 %		
					1 dokumen	100,00%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dokumen				
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 1 laporan	1 laporan	100,00%		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100,00%		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 386 orang/bulan	386 Orang/bulan	100,00 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target 1000 Dokumen	1.000 Dokumen	100,00 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target 1 laporan	1 laporan	100,00 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 laporan	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan target 14 laporan				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, dengan target 100 %	66,66 %	66,66 %		
			(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan target 4 dokumen	4 Dokumen	100,00 %		
			(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dengan target 20 orang	0 orang	0,00 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		
			(1) Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(2) Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100,00 %		
			(3) Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100,00 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, dengan target 6 dokumen	6 dokumen	100,00 %		
			(5) Penyedian Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 30 laporan	30 laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terbayarnya jasa penunjang, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 4 Laporan	4 laporan	100,00 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 4 laporan	4 laporan	100,00 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 4 laporan	4 laporan	100,00 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	75,00 %	75,00 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dengan target 2 unit	2 unit	100,00 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 unit	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya, dengan target 10 unit				
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target 10 unit	10 unit	100,00 %		
			(4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 unit	0 unit	0,00 %		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.48.506.414.110,- dengan realisasi Rp.44.224.660.572,- atau 91,17 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	106,70 %	106,70 %		
			a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		
			(1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(2) Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar, dengan target 8 unit	8 unit	100 %		
			(3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan	1 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				target 1 unit				
			(4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan, dengan target 9 unit	9 unit	100 %		
			(5) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(6) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	126,81 %	126,81%		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 2.112 orang	1.862 orang	88,16 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 2.497 orang	2.195 orang	87,91 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	2.110	87,52 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 2.411 orang	orang			
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 8.647 orang	11.226 orang	129,83 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 14.442 orang	25.726 orang	178,13 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 64.172 orang	93.443 orang	145,61 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 10.549 orang	13.979 orang	132,51 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 12.168 orang	27.961 orang	229,79 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, dengan target 2.939 orang	3.090 orang	105,14 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar, dengan target 309 orang	331 orang	107,12 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, dengan target 4.239 orang	4.519 orang	106,61 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, dengan target 4.941 orang	5.634 orang	114,03 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar, dengan target 1 dokumen	0 dokumen	0,00 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
			(16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan target 1 Dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(18) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(19) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(20) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (klb) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan, dengan target 1	1 paket	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Rujukan/Nasional	paket				
			(21) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(22) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), dengan target 1 laporan	1 laporan	100,00%		
			(23) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			(24) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 438 orang	639 orang	145,89 %		
			(25) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 31 orang	74 orang	238,70 %		
			(26) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria, dengan target 11 orang	44 orang	400 %		
			c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Fasyankes melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan target 100%	100,00 %	100,00 %		
			(1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			(1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan, dengan target 5 Unit	5 Unit	100.00		
			3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.458.694.700,- dengan realisasi Rp.141.809.500,- atau 30,92 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Rasio tenaga medis per satuan penduduk dan Rasio Dokter Per satuan Penduduk dengan target 98/1000.000 dan 45/100.000	135,52 /100.000 dan 64,98/100.000	138,77 % dan 144.44 %		
			a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perizinan Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota yang dibuat, dengan target 100 %	100 %	100,00 %		
			(1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	500 orang	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesehatan sesuai Standar	(fasyankes), dengan target 500 orang				
			(2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100,00		
			c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 30 orang	18 orang	60,00 %		
			(1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya, dengan target 30 orang	18 Orang	60,00 %		
			4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman Alokasi anggaran sebesar Rp.14.998.900,- dengan realisasi Rp.4.949.800,- atau 33 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		
			a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	Cakupan sarana yang memiliki izin kesehatan, dengan target 100 %	100,00 %	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Percentase Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dibuat, dengan target 100 %	100,00 %	100,00%		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor pirt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Percentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat kesehatan,	100,00 %	100,00 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	dengan target 100%				
			(1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan, dengan target 24 unit	24 unit	100,00 %		
			5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.89.772.700,- dengan realisasi Rp.1.520.000,- atau 1,69 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target 100 %	50,00 %	50,00 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat, dengan target 100%	100,00 %	100,00 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100,00 %		
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Percentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	0 %	0 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dibuat, dengan target 100 Persen				
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan target 1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		
		UPTD PUSKESMAS LAKESSI	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.1.353.179.740,- dengan realisasi Rp.1.450.899.173,- atau 107,22 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, Target 1 unit Kerja	1 Unit kerja	100 %		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.729.146.127,- dengan realisasi Rp.399.551.433,- atau 54,79 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	2008 %	2008 %		
			a. Penyediaan Layanan	Cakupan Ketersediaan layanan	2008 %	2008 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %				
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 12 orang	1392 orang	11.600 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang dilayani, dengan target 600 orang	4.234 Orang	705,66 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang dilayani, dengan target 12 orang	375 orang	3.125 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 6 dokumen	6 dokumen	100 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 6 dokumen	6 dokumen	100 %		
			(6) Pengelolaan Surveilens Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilens, dengan target 6 Dokumen	6 dokumen	100 %		
			(7) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 6 dokumen	6 dokumen	100 %		
			(8) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(9) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal),	4 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			dan Pemberian Obat Massal)	dengan target 4 laporan				
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang dilayani, dengan target 30 orang	70 orang	233.33 %		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.140.400.000,- dengan realisasi Rp. 140.400.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 8 dokumen	8 dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Surveilens Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Surveilens, dengan target 6 Dokumen	6 dokumen	100 %		
			(10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 6 dokumen	6 dokumen	100 %		
			(11) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlahdokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(11) Investigasi Awal	Jumlah laporan hasil investigasi	4	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), dengan target 4 laporan	laporan			
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang dilayani, dengan target 30 orang	70 orang	233.33 %		
			4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.140.400.000,- dengan realisasi Rp. 140.400.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			b. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(2) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 8 dokumen	8 dokumen	100 %		
		UPTD PUSKESMAS CEMPAE	1) Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.011.959.700,-dengan realisasi Rp.1.778.769.028,- atau 88,62 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan Target 100%	100%	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, Dengan target 1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.587.882.100,-dengan realisasi Rp.350.496.700,- atau 59,62 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	132,50 %	132,50 %		
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	132,50 %	132,50 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 339 ibu hamil	193 ibu hamil	56,93 %	Adanya Faktor 4 T sehingga merasa malu untuk memeriksakan kehamilan di awal kehamilan, Tidak ada keluhan di awal kehamilan sehingga tidak dating memeriksakan kehamilannya dan pencatatan kunjungan ibu hamil harus lengkap dari kunjungan 1 (K1)	Melakukan kunjungan rumah untuk memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan melibatkan kader, Mengobservasi calon pegantin yang telah menikah 3 bulan kemudian.

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
							sampai kunjungan ke 6 (K6)	
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 324 ibu bersalin	198 ibu bersalin	61,11 %	Beberapa pasien melakukan persalinan di daerah atau kampung sehingga tidak tercatat di layanan Kesehatan Parepare dan 3 kasus melahirkan di rumah	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan mengaktifkan Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan melakukan pertemuan lintas sektor untuk terlibat.
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 1.225 balita	1.201 balita	98,04 %	Tidak ada realisasi keuangan karena kegiatan tidak berada pada sub kegiatan yang tepat sesuai nomenklatur permendagri, rencana perubahan di Perubahan Anggaran namun tidak bisa dilakukan	Tetap melaksanakan kegiatan walaupun tidak dapat dicairkan
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar , dengan	4245 Anak	190,27%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				target 2231 Anak				
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, dengan target 488 Orang	457 Orang	93,65%		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, dengan target 655 Orang	755 Orang	115,27%		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%	Kegiatan berjalan namun tidak bisa dibayarkan karena kegiatan tidak sesuai sub kegiatan berdasarkan nomenklatur permendagri	Tetap melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran
			(10) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan target 1 Dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(12) Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), dengan target 1 Laporan				
			(13) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 30 Orang	95 Orang	300%		
			(14) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target 10 Orang	16 Orang	160%		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.99.200.000,-dengan realisasi Rp.99.200.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Percentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat, dengan target 100 Persen				
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
		UPTD PUSKESMAS LAPADDE	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.196.809.940,- dengan realisasi Rp. 1.401.626.280,- atau 117,11 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %	100%	100%		
			a. Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Target 1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp. 865.227.234,- dengan realisasi Rp. 704.196.866,- atau 81,39 persen yang dilaksanakan dalam	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	78,89 %	78,89 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			bentuk kegiatan :					
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	78,89 %	78,89 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, target 470 Orang	258 Orang	54,89%		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, target 450 Orang	389 Orang	86,44%		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, target 3.214 Orang	3.328 Orang	103,55%		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, target 2.500 Orang	1.104 Orang	44,16%	Sub Kegiatan ini harus pindah ke Sub Kegiatan Lain, sedangkan sampai akhir anggaran tidak ada perubahan anggaran	
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar , target 570 Orang	675 Orang	118,42%		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	Jumlah Orang Ter-duga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar , target	810 Orang	108%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			HIV	750 Orang				
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, target 1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, target 4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		
			(9) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, target 1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			(10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, target 1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
			(11) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas, target 2 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			(12) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), target 5 Laporan	0	0,00%	Sampai saat ini belum ada kejadian KIPI	
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar , target 150 Orang	79 Orang	52,67%		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	13 Orang	15,29%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			dengan HIV (ODHIV)	kesehatan sesuai standar , target 85 Orang				
			(15) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, dengan target 1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp. 160.200.000,- dengan realisasi Rp. 153.000.000,- atau 95,51 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target 100 %	50%	50%		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat, dengan target 100%	100%	100,00%		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, target 1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
			b. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat, dengan target 100 Persen	0 Persen	0,00%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), target 1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	Sub Kegiatan ini harus pindah ke Sub Kegiatan Lain, sedangkan sampai akhir anggaran tidak ada perubahan anggaran	
		UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO	1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.111.850.593,- dengan realisasi Rp. 1.270.954.553,- atau 114 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Percentase Pelayanan BLUD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan, dengan target 1 unit kerja	1 unit kerja	100 %		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp. 912.920.200,- dengan realisasi Rp. 793.539.401,- atau 86,92% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan target 100 %	100 %	112,78		
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Percentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	100 %	112,78		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Daerah Kabupaten/Kota					
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 150 ibu hamil	156 ibu hamil	104 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 100 ibu bersalin	154 ibu bersalin	154 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 200 anak usia pendidikan dasar	200 anak usia pendidikan dasar	100 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk dengan usia produktif yang dilayani, dengan target 100 orang usia produktif	100 orang usia produktif	100 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang dilayani, dengan target 100 orang	221 orang terduga TB	221 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang dilayani, dengan target 100	100 orang terduga HIV yang diskirining	100 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
			(9) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100 %		
			(10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(11) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(12) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pengobatan, dengan 80 target	80 orang	100 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV atau pasien ODHIV yang dilayani, dengan target 85 penderita Odhiv	85 orang	100 %		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp. 82.145.800,- dengan realisasi Rp. 81.979.600,- atau 99,80 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Masyarakat					
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		UPTD PUSKESMAS LOMPOE	2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 968.202.271,- dengan realisasi Rp. 1.117.923.341,- atau 115,46 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %	100%	100%		
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pengelolaan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan , dengan target 1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%		
			3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	474,72 %	474,72 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			820.498.844,- dengan realisasi Rp.635.608.173,- atau 77,47 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :					
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	474,72%	474,72%		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 382 ibu hamil	315 ibu hamil	82,46%		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 562 usia pendidikan dasar	2.754 anak usia pendidikan dasar	490 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang dilayani, dengan target 20434 orang	11.964 orang usia produktif	58,54 %	Sub kegiatan tidak terbayarkan karena adanya perubahan Juknis BOK, sehingga Sub Kegiatan tersebut tidak tersedia dalam menu BOK	Kegiatan sudah dilaksanakan walaupun anggaran tidak tersedia
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang dilayani, dengan target 50 orang	1.721 orang usia lanjut	3.442%	Sub kegiatan tidak terbayarkan karena adanya perubahan Juknis BOK, sehingga Sub Kegiatan tersebut tidak tersedia dalam menu BOK	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengikuti di pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang dilayani, dengan	463 orang	463 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Terduga Tuberkulosis	target 100 orang				
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%		
			(8) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%		
			(9) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%		
			(10) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan operasional pelayanan puskesmas, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah pasien orang dengan tuberkulosis dengan target 30 orang	56 orang	186%		
			4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.121.880.000,- dengan realisasi Rp.104.700.000,- atau 85,94 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat, dengan target 100 Persen	100%	100%		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100%	Sub kegiatan tidak terbayarkan karena adanya perubahan Juknis BOK, sehingga Sub Kegiatan tersebut tidak tersedia dalam menu BOK	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengikuti di pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
		UPTD PUSKESMAS LUMPUE	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota Alokasi anggaran sebesar Rp.1.798.110.535,- dengan realisasi Rp.1.940.250.626,- atau 107.9 Persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			b. Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan penunjang	1 Unit Kerja	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Pelayanan BLUD	pelayanan, dengan Terget 1 Unit Kerja				
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.901.525.100,- dengan realisasi Rp.767.796.747,- atau 85.1 Persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	265 %	265 %		
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	265 %	265 %		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 791 ibu hamil	690 ibu hamil	87.2 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang dilayani, dengan target 3.947 Balita	4.836 balita	122.5 %	Rincian Kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita telah terlaksana 100 % namun tidak dapat dibayarkan karena perbedaan nomenklatur terakhir sesuai hasil desk dengan kementerian kesehatan, dan tidak adanya anggaran perubahan pada	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
							tahun 2024 maka kegiatan tersebut tidak dapat dipindahkan ke sub kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur hasil desk TA 2024	
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 7.438 usia pendidikan dasar	7.731 usia pend. dasar	103.9 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang dilayani, dengan target 30.558 usia produktif	30.552 usia produktif	99.9 %	Rincian Kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif telah terlaksana 100 % namun tidak dapat dibayarkan karena perbedaan nomenklatur terakhir sesuai hasil desk dengan kementerian kesehatan, dan tidak adanya anggaran perubahan pada tahun 2024 maka	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
							kegiatan tersebut tidak dapat dipindahkan ke sub kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur hasil desk TA 2024	
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pasien orang terduga menderita tuberkulosis, dengan target 1.137 orang	1.208 orang	106.2 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah pasien dengan Resiko terinfeksi HIV dengan target 877 orang	946 orang	107.8 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(9) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(11) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(12) Investigasi Awal Kejadian Tidak di	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Investigasi Awal Kejadian Tidak di	1 dokumen	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			harapkan (kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal)	harapkan (kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian Obat Massal), dengan target 1 dokumen				
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah pasien dengan Orang dengan Tuberkolosis dengan target 5 orang	111 orang	2220 %		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.208.400.000,-dengan realisasi Rp.208.000.000,- atau 99.8 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat, dengan target 100 Persen	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan teknis dan	Jumlah dokumen Bimbingan teknis	1	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, dengan target 1 dokumen	dokumen			
		UPTD PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.369.084.780,- dengan realisasi Rp.272.879.878 , - atau 73,93 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			(1) Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud, dengan target 1 unit kerja	1 unit kerja	100%		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.785.846.248,- dengan realisasi Rp.519.391.589 , - atau 66,09 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	96,99 %	96,99 %		
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	96,99 %	96,99 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dengan target 100 %				
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 211 ibu hamil	187 orang	88,62 %	-Realisasi keuangan nihil karena sub kegiatan di DPA Pokok tidak sesuai nomenklatur kemendagri,dimana hanya dapat dilakukan pada saat tahapan DPA perubahan (penetapan DPA Pokok 2024 mendahului penetapan sub-sub kegiatan dari kemenkes yang sesuai dengan nomenklatur kemendagri) - Pelayanan terhadap ibu hamil merupakan pelayanan bersifat mendasar dan wajib walaupun nihil realisasi keuangan tetapi pelayanan tetap berjalan sehingga jumlah ibu hamil yang dilayani bahkan hampir mencapai target dari yang ditetapkan	Diharapkan tidak adanya tahapan DPA perubahan tidak terulang kembali atau sub kegiatan oleh kemenkes yang sesuai nomenklatur kemendagri dapat difinalkan lebih dahulu sebelum penetapan DPA pokok

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 600 balita	591 balita	98,50 %	- Realisasi keuangan nihil karena sub kegiatan di DPA Pokok tidak sesuai nomenklatur kemendagri, dimana hanya dapat dilakukan pada saat tahapan DPA perubahan (penetapan DPA Pokok 2024 mendahului penetapan sub-sub kegiatan dari kemenkes yang sesuai dengan nomenklatur kemendagri) - Pelayanan terhadap balita merupakan pelayanan bersifat mendasar dan wajib walaupun nihil realisasi keuangan tetapi pelayanan tetap berjalan sehingga jumlah balita yang dilayani bahkan hampir mencapai target dari yang ditetapkan	Diharapkan tidak adanya tahapan DPA perubahan tidak terulang kembali atau sub kegiatan oleh kemenkes yang sesuai nomenklatur kemendagri dapat difinalkan lebih dahulu sebelum penetapan DPA pokok
			(3) Pengelolaan	Jumlah anak usia pendidikan dasar	973	99,08 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	yang dilayani, dengan target 982 usia pendidikan dasar	usia pendidikan dasar			
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan terduga TB yang dilayani, dengan target 295 orang	118 orang	40 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dilayani, dengan target 175 orang	246 orang	140,57 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(8) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(9) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), target 1 laporan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.79.000.000,- dengan realisasi Rp.78.650.000,- atau 99,56 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	100 %		
		UPTD PUSKESMAS LEMOE	1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Alokasi anggaran sebesar Rp	Persentase Pelayanan Penunjang urusan pemerintahan	100%	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			557,337,026 Dengan Realisasi Rp 368,389,221 Atau 66,10 Persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.					
			a. Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dengan target 100 %	1 Unit Kerja	100%		
			1) Pengelolaan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan , dengan target 1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp. 925,839,004 dengan realisasi Rp. 649,494,142 atau 69,92 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	548,29%	548,29%		
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	548,29%	548,29%		
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 100 ibu hamil	80 ibu hamil	80 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 100 ibu bersalin	88 ibu bersalin	88 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 300 balita	409 balita	136,33%	Kegiatan Harus Melalui Perubahan Anggaran	Membuat perencanaan yang baik
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, target 1000 usia pendidikan dasar	186 anak usia pendidikan dasar	18,6 %		
			(5) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani, target 500, usia produktif	2357 Orang Usia Produktif	471,4 %	Tidak sesuai Dengan nomenklatur di juknis BOK	Juknis Bok Di terbikan lebih awal, dan melakukan perencanaan dengan baik
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan terduga TB yang dilayani, dengan target 10 orang	183 orang	1830%		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dilayani, dengan target 2 orang	90 orang	4500%		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(10) Pengelolaan pelayanan Surveilans	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pengelolaan surveilans, dengan target 1 dokumen	1 Dokumen	100%		
			(11) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(12) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(13) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan(ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), target 1 laporan	1 laporan	100 %	Tidak Ada Kasus KIPI	
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang dengan TB yang dilayani, dengan target 2 orang	10 orang	500%		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV	Jumlah orang dengan HIV yang dilayani, dengan target 1 Orang	0 Orang	0 %	Karena tidak adanya sasaran HIV	
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.87.150.000,- dengan realisasi Rp.78.225.000,- atau 89,76 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Percentase upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kota	Percentase laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b.Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Percentase laporan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota				
			(2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan target 1 Dokumen	1 dokumen	100%		
		UPTD. PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU CALL CENTRE 112	2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat . Alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan realisasi Rp.2.231.489.151,- atau 89,26 persen	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	80,95 %	80,95 %	1. Tidak tercapai dikarenakan adanya regulasi aturan yang berubah 2. Adanya efisieensi Anggaran terutama untuk pengadaan Belanja Modal	
			a. Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	80,95 %	80,95 %		
			(1) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan target 42 dokumen	34 dokumen	80,95 %		
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.166.999.910,- dengan realisasi	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	87 %	87 %	1) Adanya efisieensi Anggaran terutama untuk pengadaan Belanja Modal	1) Pada saat Penentuan Pagu RKA, ditetapkan memang standar Kegiatan/rekening

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Rp.45,242,666,- atau 27,09 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :				2) Regulasi untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang harus disesuaikan dengan tarif perda terbaru belum ada 3) Ada kesalahan Kode rekening belanja dan saat diperbaiki tidak diakomodir pada pengajuan Parsial Urgen.	Belanja 2) RKA yang telah diajukan mohon dikoreksi terutama Kode rekening dengan jenis belanjanya 3) Regulasi untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan bisa ditindak lanjuti oleh pejabat berwenang
			a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target 100 %	87%	87%		
			(16) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan target 30 dokumen	26 dokumen	87 %		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan.

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembanguna Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran instansi Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut demi mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, antara lain :

1. Untuk tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Parepare telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2024. Penetapan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024 – 2026
2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu indikator *input, output* dan *outcome*.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual.
2. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada.
4. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat
5. Menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja

LAMPIRAN

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja	
1	Agar melampirkan pedoman teknis perencanaan kinerja	Telah dilampirkan pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
B	Pengukuran Kinerja	
1	Agar menyempurnakan dokumen pedoman teknis yang dilengkapi penjelasan setiap alur beserta peran stakeholder	Telah ada pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2	Agar SOP yang dilampirkan memuat penjelasan yang memadai terhadap proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja, termasuk penjelasan pengumpulan data kinerja berbasis aplikasi	Telah ada pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
3	Agar melampirkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Data kinerja yang digunakan sudah relevan
C	Pelaporan Kinerja	
1	Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Perubahan budaya kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan dan komitmen semua pegawai dalam mencapai target kinerja
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Evaluasi dilakukan dengan melibatkan pengelola program lingkup Dinas Kesehatan
2	Agar menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
2	Indeks Kesehatan	Persen	80,12	79,97
2	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai	B	Berposes
No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru	per 1000 KH	11,61	13,27
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		972,00	987,00
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1000 KH	0,41	13,27
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 KH	10,37	10,98
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	124,43	183,06
6	Rasio Posyandu per satuan balita	per 1000 balita	11,06	14,36
7	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pemb. per 1000 penduduk	per 1000 pddk	0,29	0,29
1,35	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	per 1000 pddk	0,03	0,03
2,35	Rasio dokter persatuan penduduk	per 1000 pddk	0,53	0,64
3,35	Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk	per 1000 pddk	1,13	1,35
4,35	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00
5,35	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	94,88	86,40
6,35	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	persen	100,00	100,00
7,35	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00
8,35	Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	persen		
9,35	Percentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	100,00	100,00
10,35	Non Polio AFP rate per 1.000 penduduk	per 1000 pddk	0,02	0,00
11,35	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100,00	23,85
12,35	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	67,52	81,40
13,35	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	322,50	585,40
14,35	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	persen	4,06	20,42
15,35	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	67,52	81,40
16,35	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	82,78	42,41
17,35	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00
18,35	Penderita diare yang ditangani	persen	100,00	69,00
19,35	Angka kejadian akibat malaria	kasus	18,00	27,23
20,35	Angka kematian akibat malaria	kasus	0	0,00
21,35	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	persen	0	0,00
22,35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	persen		0,00
23,35	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	per 1000 pddk	0,87	0,10
24,35	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	persen	73,00	97,00
25,35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	persen	77,78	60,03
26,35	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	32,39
27,35	Cakupan kunjungan bayi	persen	100,00	95,53

28,35	Cakupan Puskesmas	persen	200,00	200,00
29,35	Cakupan pembantu puskesmas	persen	100,00	100,00
30,35	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	97,07	64,07
31,35	Cakupan pelayanan nifas	persen	94,25	81,51
32,35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100,00	100,00
33,35	Cakupan pelayanan anak balita	persen	73,56	81,04
34,35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100,00	88,62
35,35	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	99,00	100,00
36,35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100,00	119,73
37,35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100,00	100,00
38,35	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100,00	100,00
No	Indikator SPM	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	88,16
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	89,91
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	87,52
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	129,83
5	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	178,13
6	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	145,61
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	132,51
8	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	229,79
9	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan Layanan kesehatan	Per센	100,00	105,14
10	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani \kesehatan	Per센	100,00	107,12
11	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	106,61
12	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	Per센	100,00	114,03
No	INDIKATOR SDGs	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Per센	90,89	90,12
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Per센	99,75	100,00
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Per센	100,00	100,00

4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	11,91	13,82
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	8,73	11,45
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persen	8,35	10,26
7	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen		
8	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	3,52	9,12
9	Percentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	60,00	69,34
10	Angka Kematian Ibu (AKI).	per 100.000 KH	124,43	183,06
11	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	99,75	100,00
12	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	99,75	100,00
13	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	0,42	13,27
14	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	10,37	10,98
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	11,61	13,27
16	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	per 1000 pddk	0,01	0,05
17	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	per 1000 pddk	0,09	0,10
18	Kejadian TB per 1000 orang	per 1000 org	3,17	5,20
19	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	316,89	520,42
20	Percentase kecamatan yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap bayi	Persen	100,00	100,00
21	Kejadian Malaria per 1000 orang.	per 1000 orang	0,11	0,27
22	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	per 100.000 pddk	11,85	26,61
23	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	2,00	3,00
24	Percentase merokok pada penduduk umur 10 - 18 tahun.	Persen	1,92	0,85
25	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	1,92	22,97
26	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	2,78	10,83
27	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	8,00	8,00
28	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Kasus	2,00	2,00
29	Unmet need pelayan kesehatan			
30	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Per 1000 pddk	846,00	901,00
31	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	90,89	90,12
32	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	100,00	100,00
33	Percentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100,00	100,00
34	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen		
35	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	97,79	97,79
36	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kelurahan	22,00	22,00

37	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kelurahan	22,00	22,00
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------